Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hidayat Hamonangan Lintang

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: hidayathamonanganlintang0@gmail.com

Abstrak

Banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai keritik dari berbagai elemen masyarakat. Petanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis nomatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data yang diperoleh dengan cara menggunakan menganalisis pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan secara umum di atur dalam Pasal 285 yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Sedangkan secara khusus di atur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, di antaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana amar putusan tersebut menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat tetap dilaksanakan dan hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata kunci: *Perlindungan Anak, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual semakin meraja rela. Bahkan, kasus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran cukup signifikan terkait pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat mempertahankan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga. Salah satu kekerasan seksual yang marak terjadi adalah pemerkosaan yang biasanya tindak pidana pemerkosaan diawali dengan pelecehan seksual.

Masalah pemerkosaan yang dialami perempuan dewasa dan anak merupakan contoh rendahnya posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan dewasa dan anak senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik, serta psikis. Pemerkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Tindak pemerkosaan di Indonesia mengindikasikan bahwa ada masalah dalam nilai budaya, social, ekonomi dan politik di masyarakat. Pemerkosaan merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Itu sebabnya, menyepelkan tindak pidana seksual sama halnya dengan menghalangi korban menikmati hak asasi dan kebebasan. Sebagaimana yang telah disepakati di Wina 1993 bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi. Kesetaraan gender di Indonesia masih sulit di capai karna adanya kendala-kendala sosial-budaya. Khususnya struktur masyarakat yang patriarkal. Sampai akhirnya, Indonesia baru saja memiliki suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang baru disahkan padahal sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang tidak tahu hak mereka, sehingga takut melaporkannya. Tidak jarang pula ada penegak hukum yang tidak tahu apa saja hak-hak korban. Padahal kekerasan seksual memberikan dampak yang buruk terhadap kondisi psikologi korban.

Pemerintah untuk lebih peduli terhadap kekerasan seksual. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya membuat suatu kebijakan yang membuat pelaku jera dan melindungi hak-hak korban, salah satunya dengan mengesahkan RUU PKS. Dengan RUU PKS di sahkan, maka para penegak hukum di Indonesia akan lebih maksimal dalam menangani kasus pelecehan seksual dan memastikan pelaku tidak lepas begitu saja dari jeratan hukum. Mari bersama-sama kita memerangi segala bentuk pelecehan seksual dengan tidak menormalisasi tindakan-tindakan yang menjerumus pada kekerasan seksual. Selain itu, kita harus memberikan dan merangkul korban agar lebih berani untuk speak up dan bangkit dari rasa trauma yang ia alami. Karna keberanian korban untuk berbicara adalah pandangan untuk menundukan para pelaku pelecehan seksual.

Salah satu perbuatan yang banyak dibenci oleh masyarakat adalah ketika didapati adanya perilaku pemerkosaan yang memperkosakan seorang anak. Kasus pemerkosaan menjadi salah satu isu yang terus hangat di kehidupan bangsa kita karena masih banyak orang yang tidak mempunyai hati nurani dan lebih parahnya lagi pemerkosaan itu dilakukan oleh oknum guru santri yang memperkosakan anak didiknya. Allah SWT melalui salah satu ayatnya menegaskan keharaman berbuat zina dalam surah Q.S An-Nur Ayat 2 berfirman:

الرَّزَايَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَبَّهَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang beriman.

Hukuman mati terhadap pemerkosaan anak juga di atur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Undang-undang ini menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati pada pelaku pemerkosaan dinilai tidak berpriskemanusiaan dan bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Karena pada dasarnya hak untuk hidup sudah di atur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan hak untuk hidup termaksud hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan, berarti negara mengambil hak untuk hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (non derogable). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi terpidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman mati pada pelaku pemerkosaan anak bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkan kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul : “Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Pelaku Pemerkosaan

Ketentuan Hukum pidana Dalam Mengatur Pemerkosaan Secara Umum

Pemerkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang sangat cepat meningkat di Indonesia dan dalam hitungan jam perbuatan tersebut banyak memakan banyak korban termaksud anak-anak, orang dewasa, bahkan lanjut usia, kejahatan pemerkosaan ini sering terjadi dibanyak negara lainnya. Dampak atau kerugian terhadap korban yang mengalami atau menerima kejahatan seksual tersebut, antara lain berdampak pada psikis dan mental sang korban. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korban.

Ketentuan dalam pasal 285 terdapat adanya unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan dan ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita
- c. Bersetubuh diluar perkawinan dengan dia (pelaku)
 - 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, sampai orang itu jadi pingsan dan tak bedaya.

- 2) Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- 3) Bersetubuh diluar perkawinan, artinya perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Pemeriksaan tanpa paksaan, terkadang hal ini luput dari perhatian masyarakat, KHUP juga mengenal kejahatan pemerkosaan yang tidak mensyaratkan adanya paksaan dari pelaku terhadap korbannya, yakni pemeriksaan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun berdasarkan Pasal 286. Syarat mutlak adalah keadaan korban yang pingsan atau tidak berdaya ini bukan karena perbuatan pelaku, misalnya korban tidak berdaya akibat ulahnya sendiri contoh karena minuman keras, dan pelaku kemudian menyetubuhi korban tersebut. Jika korban pingsan akibat perbuatan pelaku maka masuk kejahatan pemeriksaan Pasal 285 KUHP, karena menurut Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pemeriksaan terhadap wanita pingsan/ tidak berdaya dan terhadap wanita belum cukup umur diatas disyaratkan dilakukan diluar perkawinan artinya pelaku dan korban tidak terkait suatu perkawinan, pelaku dan korban bukanlah suami istri, artinya :

- Pertama : bukanlah merupakan kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang sedang pingsan/ tidak berdaya.
- Kedua, bukanlah merupakan kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang belum berusia 15 tahun.

Tetapi, jangan salah, KUHP tetap mengancam pidana terhadap suami yang menyetubuhi istrinya yang belum berusia 15 tahun asal dipenuhi syarat yakni seperti yang tersebut dalam Pasal 288 KHUP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersebutuh dengan seseorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Artinya KUHP menganggap merupakan suatu kejahatan jika suami menyetubuhi istrinya yang belum berusia 15 tahun jika persetubuhan itu mengakibatkan :

- Istrinya yang masih muda tersebut mengalami luka-luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari yang semula. Misalnya mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau.
- Istri yang masih muda tersebut mengalami luka berat.
- Istri yang masih muda tersebut mati.

Ketentuan pidana inilah yang kemudian menjadi rasio lahirnya batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 16 tahun. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Ketentuan Hukum Pidana Dalam Mengatur Pemeriksaan Secara Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan hukum pidana yang mengatur pemeriksaan terhadap anak yang di atur didalam pasal 76D Berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”¹

Terdapat juga hukuman yang mengatur tindak pidana pemeriksaan terhadap anak yang di atur didalam pasal berikut:

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 81A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjadi pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, social, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi peraturan pemerintah.

Selain tindak pidana pemerkosaan terdapat juga tindak pidana pencabulan, ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan yang di atur dalam pasal 76E yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul"

Terdapat juga hukuman yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak yang di atur didalam pasal berikut:

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karna melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 5) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat ditambahi pidana tambahan berupa pengumuman identitas.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 82A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah pidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum, social, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan saksi hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak serta dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, maka negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan segala fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak agar dapat berjalan secara dengan optimal dan terarah dalam sehingga dapat menjadi generasi penerus yang dapat memajukan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dimana yang akan datang.

Kehadiran Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak merupakan bentuk penegasan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak sehingga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik dan mental, spiritual dan sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang tentunya harus menjadi insan yang potensial, tangguh dan dilandaskan dengan nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tuna, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Karena itu maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak dalam bidang hukum khususnya terhadap tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan perlindungan

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan yang dimaksud agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termaksud hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Hal ini tentu menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai insan yang perlu diperhatikan dan mendapatkan segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri, namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupan dimulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu oleh keluarga sendiri. Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideology keluarga, khususnya dalam budaya jawa "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri" situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the "dark number" karena tidak dilaporkan.

Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, kerena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Selain berbagai bujukan, ancaman sekaligus langka-langka pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karna masalah seksual adalah masalah yang di tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya secara sehat. Ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi, memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terbawa terus kemasa dewasa. Perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual dan mereka menjadi pihak yang tidak berdaya. Kasus-kasus tersebut sering kali menjadi gunung es, dan tidak terungkap bahkan korban menganggap dengan tidak membuka kasus tersebut adalah pilihan yang bijak sana.

Reaksi keras dari masyarakat terhadap kejahatan seksual menjadi pembuka wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak melalui sanksi kebiri. Wacana tersebut pertama kali diusulkan oleh KPAI dan di dukung oleh Mentri Sosial. Sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tersebut dipuci oleh terjadinya peristiwa-peristiwa kejahatan seksual yang menimpa pada anak dan sangat dikecam oleh masyarakat. Adanya keinginan dari berbagai pihak untuk "memonifikasi" hukuman (sanksi pidana) berupa pemberatan hukuman dengan kebiri merupakan ganjaran yang dipandang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual. Harapan agar mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus dengan cara pemberatan hukuman tersebut. Meskipun wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan berbagai pihak termaksud para ahli hukum, medis dan pegiat hak asasi manusia. Karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap anak maka hukum kita memberikan definisi berbeda tentang anak, tetapi dalam konvensi PBB tentang hak anak diberikan batas usia 18 tahun kebawah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengadopsi batasan yang ada didalam konvensi hak anak, yaitu 18 tahun kebawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah atau belum menikah.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus global dan dampak negative dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta gangguan rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penurunan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Euforia masyarakat dalam menyambut terbitnya Perpu No 1 Tahun 2016 tidak dapat disanksikan lagi kebenerannya. Perpu “kebiri” yang menimbulkan pro kontra di masyarakat menjadi pembicaraan hangat di diskusi akademisi maupun warung kopi.

Perpu ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-plekau lain. Pemberatan sanksi berupa kebiri merupakan upaya “balas dendam” atas nama kepentingan korban dengan lebih menitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku bagi memikirkan pengulangan kejahatan kekerasan seksual menjamin pemulihan bagi korban.

Mengenai tidak adanya pengaturan akibat yang di timbulkan dari persetujuan tersebut terhadap anak tentu sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Rumusan ini kemudian dibuat didalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 Ayat 5, 6, 7 dan 8 sebagai berikut:

- 1) Ayat 5 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
- 2) Ayat 6 “Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”
- 3) Ayat 7 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik.”
- 4) Ayat 8 “Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok.”

Perpu nomor 1 Tahun 2016 adalah perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Khususnya Pasal 81 tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dan pasal 82 tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan. Inti dari Perpu adalah pemberatan hukuman adalah pemberian hukuman tambahan bagi kejatan seksual terhadap anak berupa :

- 1) Hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 19 tahun dan maksimal 20 tahun
- 2) Pengumuman kepada public tentang identitas pelaku
- 3) Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok
- 4) Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan keribi kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut.

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 pada ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal (1), (2) dan ayat (3) menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karna adanya konteks pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami benar mengenai hubungan seksual dan mudah diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan/atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa paksaan bersetubuh dengan orang lain.

Berdasarkan rumusannya maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan tindak pidana biasa, karna tidak bisa mensyaratkan adanya pengaduan. Hal ini agak berbeda dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 KUHP yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan umurnya. Pasal 287 KUHP mengatur bahwa jika perempuan adalah anak yang berumur 12 tahun

kebawah terkaksud tindak pidana biasa, sedangkan jika korban perempuan berumur 12 sampai 15 tahun atau diketahui belum masanya belum kawin terkaksud tindak pidana aduan.

Sebagaimana diketahui bahwa kajian hukum pidana dalam kaitannya dengan korban berkaitan dengan pernyataan dasar mengenai apakah ada kejahatan (pelanggaran hukum) terjadi, siapa pelaku dan siapa yang menderita kerugian oleh suatu kejahatan selanjutnya perlu ditambah lagi apa kerugiannya dan bagaimana kerugian tersebut dipulihkan.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Adanya dua konsep kejahatan, pertama kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan public yang direpresentasikan oleh instrument demokrasi negara dan kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retribusi (*retributive justice*) dan konsep kedua pada konsep restoratif (*restoratif justice*).

Ketentuan saksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, penegasan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus berdasarkan atas hukum terkaksud hak asasi manusia, hak asasi manusia sudah menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan ditengah-tengah masyarakat saat ini. Tentu kondisi demikian menunjukkan tidak jarang ditemukan dalam pelaksanaannya mengalami degradasi pemahaman atas hak asasi manusia terutama berkaitan terhadap penanggungjawaban. Pada hal ini apabila diamati dari berbagai instrument internasional dan nasional yang ada sebenarnya tegas mengaturnya. Namun sayangnya masih banyak yang memiliki pandangan bahwa penanggungjawaban hak asasi manusia hanya semata-mata negara.

Hak asasi manusia telah dibahas sejak lama meskipun masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Gagasan hak masih menjadi kontroversi dan menimbulkan perdebatan filosofis. Padahal telah ada kesepakatan yuridis foeman baik internasional maupun nasional mengenai berbagai bentuk hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pencantuman masalah hak asasi manusia dalam konstitusi menunjukkan pentingnya hak asasi manusia sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak dalam berbangsa, mulai dari negara, masyarakat dan pemerintah. Jaminan hak asasi manusia harus dinyatakan secara jelas dalam konstitusi atau negara tertulis dalam konstitusi. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menghendaki perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri yang harus dimiliki. Demikian pula amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukan ketentuan hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk menyebutkan hak individu dan hak warga negara. Meskipun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas menyebutkan perbedaan antara kedua hak tersebut, namun seringkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Tidak semua hak warga negara dapat dimiliki oleh setiap individu, padahal kedunya hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi. Apalagi amandemen Undang-Undang 1945 memuat Pasal-Pasal tersendiri tentang hak asasi manusia, yang tidak digabungkan dalam ketentuan mengenai pasal tentang warga negara dan penduduk. Adanya pengaturan tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Pemerintah terkadang dituduh tidak memadai dan bahkan tidak mampu memenuhi dan melindungi apa yang merupakan hak asasi setiap warga negara.

Sedangkan masyarakat yang setuju dengan penjatuhan hukuman mati menganggap penjahat yang sadis pantas dilakukan hukuman mati karena dikawatirkan kasus serupa akan berulang. Hukuman ini dinilai sesuai salah satu tujuan hukum pidana, mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan korban, pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap

hak untuk hidup yang masih dilakukan di Indonesia. Hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia yang lain sesuai dengan Pasal 28J yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 73 menyatakan bahwa :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Adapun pandangan-pandangan yuridis terhadap hukuman mati, seperti yang dikemukakan oleh Kent pada pokoknya berpendapat bahwa :

“Barang siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu didasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal praktis”

Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tersebut diatas, negara hanya dapat mengurangi, membatasi dan mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Sepanjang ada situasi mendesak secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara. (2) Penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh berdasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, setatus social, setatus ekonimo, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan , penyimpangan atau penghapusan terhadap pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Bahwa dengan demikian baik secara Internasional/Universal maupun secara nasional, Hak Asasi Manusia seseorang dalam keadaan tertentu dapat dibatasi. Bahkan Hak Asasi Manusia yang dapat dikategorikan sebagai *non-derogable rights* pun, misalnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroactive*), dapat dikesampingkan untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (*gross violence of human rights*) seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk hidup seperti dicantumkan dalam Pasal 28A dan 28I Ayat (1) dapat dibatasi oleh Pasal 28J Ayat (2). Bahwa dengan demikian, berdasarkan amanah yang diberikan konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dalam Undang-Undang atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi.

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menuai banyak kontroversi, salah satunya terhadap Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun Pasal 6 Ayat (1) ICCPR mengakui bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non derogable rights*) berbunyi sebagai berikut

“setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak itu wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

Namun secara kontekstual hukuman mati masih diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) ICCPR berbunyi sebagai berikut :

“Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati. Putusan hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.”

Meskipun penerapan hukuman mati masih diperbolehkan, namun terdapat pembatasan dalam penerapan hukum mati sebagaimana PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards*

Guaranteeing Protection Of the Rights of Those Facing the Death Penalty) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984. Panduan ini memperjelas praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pembatasan hukuman mati tersebut antara lain:

1. Bagi negara yang belum menghapus pidana mati hanya dapat dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsensuensi laur biasa lainnya;
2. Hukuman mati hanya dibebankan pada kejahatan dimana hukuman tersebut telah diatur dalam hukuman pada saat kejahatan terjadi, dengan satu pengertian bahwa jika sekiranya terdapat keputusan saat kejahatan itu terjadi, maka dibuat ketetapan hukum dengan hukuman yang lebih ringan, sehingga pelaku pelanggaran mendapatkan keuntungan;
3. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang berusia dibawah 18 tahun, wanita hamil atau ibu atau mereka yang menderita gangguan jiwa;
4. Hukuman mati hanya dibebankan pada mereka yang terbukti bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang menyakinkan tanpa ada alternatif penjelasan fakta lain;
5. Hukuman mati hanya dapat diajukan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkopemten setelah proses hukum yang memungkinkan semua perlindungan untuk memastikan pengadilan adil, atau setara dengan yang terkandung dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mencakup hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan pendampingan hukum;
6. Terdakwa mati memiliki hak untuk mengajukan banding pada pengadilan yang lebih tinggi dan harus dipastikan bahwa naik banding tersebut harus terlaksana;
7. Seorang yang dijatuhi pidana mati berhak mengajukan permohonan maaf, pengurangan hukuman, dapat diberikan pada semua kasus hukuman mati;
8. Hukuman mati sebaiknya tidak tertunda pada sidang naik banding atau prosedur lainnya karena pengajuan permohonan ampun atau pengurangan hukuman;
9. Keputusan pidana mati hanya diambil dengan pembebanan penderitaan terendah.

Dengan Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tanggal 25 1984 ini menunjukan bahwa berlakunya pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat Internasional secara Universal. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya.

Membicarakan hukuman mati perspektif Hak Asasi Manusia mengharuskan kita merujuk kembali pada dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia yang selama ini dijadikan standar Internasional, terutama pada DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Kedua dokumen ini, di samping Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah dikenal sebagai instrument utama Hak Asasi Manusia dewasa ini atau dikenal pula dengan *Bill of Human Rights*.

Melalui DUHAM, PBB telah mendeklarasikan penghentian hukuman mati, secara global pada tahun 1948. Walaupun, pada saat perumusan DUHAM di komite Tiga PBB juga menuai perdebatan yang sengit di antara negara PBB sendiri. Para perancang DUHAM memahami betul bahwa penghapusan hukuman mati memerlukan waktu yang panjang dan dalam perjalanan waktu perkembangan Hak Asasi Manusia, hukuman mati mendapatkan tempat utama dalam perdebatan diskusi Hak Asasi Manusia. Pasal 3 DUHAM menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”

Pernyataan umum yang tercantum di dalam DUHAM dila dibandingkan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik Nampak jelas bila merujuk kembali pada perdebatan historis sebagaimana Pasal ini dirumuskan. Pada DUHAM dirumuskan pembahasan tentang ICCPR sudah berlangsung pada 1947, namun belum mencapai titik temu di antara negara-negara dalam hal bagaimana hukuman mati disikapi. Untuk itu pula, rumusan di dalam DUHAM

Nampak sangat umum dan normatif, bersifat positif mengakui keberadaan hak atas kehidupan bagi setiap orang dan sama sekali tidak menyinggung tentang hukuman mati.

Di sisi lain, kesadaran akan sulitnya menghapuskan hukuman mati secara total ini dimuat pada dalam sejumlah instrument Hak Asasi Manusia yang disusun pada era 1950-an dan 1960-an. Harus diakui bahwa pada masa itu hukuman mati mulai dibatasi untuk beberapa tindak pidana yang dianggap sangat serius dan dilarang untuk diterapkan terhadap kelompok tertentu, seperti anak-anak, perempuan hamil atau orang lanjut usia. Dalam hal ini, ruang kecil keterbukaan hukuman mati pada dasarnya sangat rumit untuk mengatakan tidak mungkin untuk diterapkan, karena ambiguitas interpretasi terhadap tindak pidana yang sangat serius tersebut, siapa dan bagaimana menentukan keseriusan tindak pidana itu. Untuk itu, para pakar yang menyusun sejumlah instrument tersebut nampaknya hendak menutup rapat-rapat pintu praktik hukuman mati, namun tetap memperhatikan kendala dan tantangan yang sangat sulit untuk diatasi dalam waktu singkat.

Pengaturan hukuman mati dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional tidak luput dari perdebatan serius antar negara-negara di dunia. Satu sisi terdapat negara-negara terutama pada saat proses penyusunan DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menghendaki penghapusan, namun ada banyak negara yang masih menginginkan hukuman mati tetap diterapkan di negara mereka. Negosiasi yang alot ini menghasilkan rumusan Pasal 6 ICCPR yang walaupun tidak melarang secara penuh hukuman mati, namun memperketat praktiknya hanya untuk kejahatan yang termaksud dalam kategori sangat serius dan penerapan sanksi hukuman mati tersebut harus sesuai dengan ICCPR dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara umum.

Pembatasan hukuman mati menurut Pasal 6 ICCPR ini mengarah pada pemberlakuan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. Walaupun ICCPR ataupun hukum internasional sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan yang paling serius, sejumlah dokumen PBB mengarah pada suatu kesimpulan bahwa ruang lingkup hukuman mati pada prinsipnya tidak boleh diterapkan pada kejahatan-kejahatan di luar kejahatan yang berencana yang berakibat serius, masif dan sangat mematikan. Artinya prinsip pengecualian penggunaan hukuman mati tersebut hanya dimungkinkan untuk kejahatan-kejahatan berencana, yang serius dan ekstrem, serta tidak boleh diterapkan diluar hukuman tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan”

Disisi lain, pengaturan khusus tentang hukuman mati juga diatur dalam sejumlah instrument Hak Asasi Manusia internasional, diantaranya adalah Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati, yang terbuka untuk tanda tangan dan ratifikasi. Walaupun menginduk pada ICCPR, OP ke-2 ICCPR ini hanya mengikat negara-negara yang telah meratifikasi, karena tidak langsung OP ini merupakan implikasi dari titik negosiasi perumusan ICCPR yang selesai pada tahun 1954.

Di Indonesia cara pelaksanaan hukuman mati, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu Pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan dilingkup peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, menurut ketentuan dan Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964.

Sebelum adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan dan mengikat jerat itu pada tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjerat tali yang terikat ditiang gantung leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat gantung terpidana berdiri sehingga tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si

terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintah Hindia Belanda dulu.

Satochid Kartanegara dikatakan sebagai berikut:

“Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan orang seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak didepan regu penembak”.

Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer” ini terdiri dari 4 BAB dan 19 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Umum, Pasal 1

BAB II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkup peradilan umum, Pasal 2-16

BAB III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkup peradilan militer, 17

BAB IV : Ketentuan pealihan dan penutup

Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, di antaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana amar putusan tersebut menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat tetap dilaksanakan. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2,3/PUU-V/2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luarbiasa, terutama terhadap perkembangan psikolginya di masa yang akan datang. Akibat dari depresi, malu dan sebagainya. Oleh karena itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan *ekstra ordinary crime* atau “*the most serious crime*”, bahkan jika kekekrasan seksual terhadap anak yang menimbulkan lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana mati, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yng kejam. Anak sebagai korban kejahatan berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya dimasa yang akan datang. Hukuman mati dan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak melanggar hak asasi manusia. Apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28 J Ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokrasi.”

Memastikan seluruh ketentuan Undang-Undang ini dilaksanakan maka Undang-Undang maka dibuatlah badan khusus pengawas hak asasi manusia yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Komisi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan taraf perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Komisi, seharusnya , terdiri dari 35 orang yang dipilih dari warga negara Indonesia yang berintergritas, berdidikasi dan

professional. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali jabatan.

Komisi memiliki fungsi yaitu pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, ditambah fungsi penyidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, komisi dapat melakukan penelitian, penerbitan hasil kajian, studi pustaka, pembahasan berbagai masalah hak asasi manusia serta bekerja sama dengan lembaga lain baik local, nasional maupun internasional. Fungsi penyuluhan dapat dilakukan dengan penyebarluasan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia juga melakukan pendidikan hak asasi manusia melalui semua sektor yang dimungkinkan. Fungsi pemantauan dilakukan dengan melakukan penyidikan dan pemeriksaan, pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi, peninjauan lokasi dan pemberian pendapat dengan persetujuan ketua pengadilan tempat dimana kasus terjadi. Sedangkan fungsi mediasi penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penelian ahli dan pemberian rekomendasi, baik kepada para pihak maupun kepada dewan perwakilan rakyat.

Fungsi penyidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang ini, ada dua jenis kejahatan kemudian dinamakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah genosida dan kejahatan terhadap manusia. Berdasarkan Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dimaknai "serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang in"

Didalam melakukan penyelidikan, KOMNAS HAM berwenang membentuk tim *hoc* yang berisi masyarakat sipil yang kompeten untuk membantu tugas KOMNAS HAM. Didalam melakukan KOMNAS HAM berwenang melakukan tindakan dibawah ini:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk meminta dan didengar keterangannya.
4. Menggail saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.
5. Meninjau, dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Menanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

Setelah melakukan penyelidikan, KOMNAS HAM akan menyimpulkan apakah patut diduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak. Dalam hal ini penyelidikan menunjukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka KOMNAS HAM akan menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut. Jaksa Agunglah yang berwenang melakukan penyidikan dengan melakukan penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan Hak Asasi Manusia.

4. KESIMPULAN

1. Ketentuan umum tindak pidana pemerkosaan umum diatur dalam BAB XIV KHUP tentangnng Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang terdapat didalam Pasal 285 apabila melakukan pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 286 apabila melakukan pemerkosaan diketahui bahwa korban dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, Pasal 287 apabila pemerkosaan mengakibatkan luka-luka. Sedangkan ketentuan secara khusus diatur dalam Pasal 76D dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1-9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

2. Ketentuan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak di ataur dalam Pasal 81 ayat (1-9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimana korban haruslah anak yang belum berusia 18 tahun. Sanksi yang diberikan kepada pemerkosa anak mulai dari 5 tahun hukuman penjara, kebiri kimia hingga hukuman mati. Hukuman tambahan dikecualikan bagi pelaku anak sebagaimana yang telah diatur dalam ayat (9)
3. Pelaku pemerkosaan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai graviora deicta atau kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologi anak. Karena itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan ekstra ordinary crime atau "the most serious crime", yang dimana pelaku dapat dihukum mati apabila terbukti melanggar Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Indonesia masih menganut hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serius. Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, diantaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait permohonan pengujian Undang-Undang 2/Pnps/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan umum dan militer, dimana dalam amar putusan tersebut permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat dilaksanakan dengan syarat jika pelaku sudah berusia 18 tahun, sedang tidak hamil, sedang melahirkan dan cacat mental atau gila

5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Astuti, M. (2018). Yurisdiksi Ekstrateritorial Sebagai Alat Untuk Memerangi Parawisata Seks Anak.
- Fajaruddin, F. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, 10(2), 23-35.
- Harisman, H., & Fajriawati, F. (2022, April). Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 408-413).
- Harisman, H., & Rahmi, A. (2021, July). Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 923-928).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112
- Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60.
- Rahmi, A. (2021, November). The Elimination of Sexual Violence Bill: Prevention Effort and Access to Justice for Victim. In *2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)* (pp. 451-455). Atlantis Press.
- Rahmi, A., Hadita, C., & Salamah, U. (2023, April). Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence in Tourist Attractions in Support of the Green Economy Through a Child-Friendly Tourism Industry. In *Brawijaya International Conference (BIC 2022)* (pp. 319-325). Atlantis Press.
- Ramadhani, R. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Simatupang, N. (2022, June). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 466-474).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2020). Protection of Children as Victims of Domestic Sexual Violence. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 71
- Simatupang, N., Mahmutarom, H. R., & Wahyuningsih, S. E. (2023). Reconstruction in Regulation of Castration Punishment for Children Protection as Sexual Victim Based on Value Justice. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(1), 34-39.